

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Skripsi ini akan mengupas tentang apa saja faktor-faktor terbentuknya *Agreement on Comfort Women* tahun 2015 yang dilakukan Korea Selatan dan Jepang dengan batasan tahun 2015. Secara geografis Korea Selatan dan Jepang merupakan dua negara yang bertetangga, yang juga merupakan sekutu bagi Amerika Serikat, Korea Selatan dan Jepang merupakan negara di kawasan Asia Timur yang penting bagi Amerika Serikat untuk menjalankan kepentingannya. Walaupun Jepang dan Korea Selatan merupakan tetangga secara geografis namun ternyata kedua negara ini memiliki hubungan yang rumit, yang di bebani oleh sejarah kelam hubungan kedua negara ini pada abad 19 dan 20.

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Seperti halnya negara lain, dalam hubungan Jepang dan Korea Selatan terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi keharmonisan hubungan kedua negara ini salah satunya yaitu sejarah. Sejak tahun 1910, Jepang melakukan penjajahan kepada Korea (Setiarini, 2017). Seperti penjajahan di negara lain, Korea juga merasakan kejahatan Jepang seperti kerja paksa, larangan penggunaan bahasa Korea, dan bahkan perbudakan seks kepada wanita. Wanita-wanita yang pada saat itu terlibat dalam kegiatan perbudakan seks di sebut sebagai *comfort woman* atau dalam bahasa Jepang *jugun ianfu*.

*Comfort woman* merupakan sebutan bagi budak seks yang difasilitasi oleh Jepang untuk memuaskan nafsu tentara Jepang selama periode militeristik Jepang yang berakhir dengan perang dunia II, kurang lebih jumlah dari *comfort women* ini sekitar 200.000 wanita yang berasal dari Korea, China, Taiwan, Indonesia dan bagian Asia lainnya dan sebagian dari mereka paling banyak berasal dari Korea Selatan (Lynch, n.d.), sehingga jika dilihat Korea Selatan lah yang paling sering *speak up* terhadap isu *comfort woman* ini.

Awal mula didirikannya *military comfort women system* ini karena Jepang melihat salah satu permasalahan dari militer Jepang yang dapat mengakibatkan kekalahan datang dari stress yang dialami oleh tentara Jepang akibat perang, para tentara Jepang ini pun melampiaskannya dengan cara memperkosa wanita-wanita Jepang. Hal ini dinilai oleh pemerintah Jepang sebagai suatu langkah berbahaya yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat Jepang terhadap tentara Jepang kedepannya, oleh karena itu kemudian pemerintah Jepang kemudian membuka rumah bordil untuk tentara Jepang yang di dalamnya merupakan wanita-wanita pemuas yang disebut oleh mereka sebagai "*Jugun Ianfu*" (Fauzia, 2017). Pada tahun 1931, Jepang membangun *Military "Comfort Station"* di berbagai daerah kekuasaannya. Jepang kemudian merekrut wanita-wanita yang awalnya memang bekerja sebagai pekerja seksual namun seiring waktu permintaan atas *comfort woman* di *comfort station* makin meningkat sehingga hal ini mengakibatkan Jepang mulai merekrut wanita-wanita dengan berbagai cara salah satunya yaitu mengiming-imingi wanita yang butuh uang dengan pekerjaan. Wanita-wanita ini kemudian dibawa oleh militer Jepang ke *comfort station* yang tersebar di berbagai daerah kekuasaan Jepang (Fiandara, 2017), disana wanita-wanita ini dipaksa untuk melayani tentara Jepang dan diperlakukan dengan tidak layak.

*Comfort station* yang dibangun pada saat itu merupakan salah satu bagian dari sistem prostitusi negara (sistem prostitusi dengan regulasi pemerintah) yang diusung oleh Jepang dan koloninya (Yeong-ae, Nationalism and Gender in the Comfort Women Issue, 2009) untuk mengurangi stress dari militer Jepang dan mengurangi angka pelecehan serta pemerkosaan wanita Jepang yang dilakukan oleh tentara Jepang pada saat itu, sehingga dapat dilihat bahwa *comfort station* yang didirikan sesuai dengan sistem prostitusi yang diatur oleh pemerintah dan bahwa militer terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam isu ini. Mereka kemudian merekrut dan meletakkan *comfort women* di berbagai

*comfort station* yang sudah ada, para wanita-wanita pekerja ini kemudian dibagi berdasarkan ras dan etnis dengan sistem hirarki yang khas militer Jepang.

*Comfort woman*, merupakan salah satu warisan sejarah kelam yang dialami oleh warga negara yang di jajah oleh Jepang, khususnya para korban. *Comfort women*, sesuai dengan namanya “*comfort*” diharapkan memberikan kenyamanan bagi militer Jepang yang saat itu tidak nyaman dengan tekanan perang yang ada, namun nyatanya, wanita-wanita pekerja ini tidak mendapatkan kenyamanan sedikitpun. Mereka diperlakukan sebagai budak seksual, beberapa dari mereka di ancam akan di bunuh jika melawan dan menolak, bahkan beberapa dari mereka meninggal dunia akibat kondisi yang memprihatinkan.

Ketika perang dunia II berakhir, *comfort station* kemudian di bubarkan. *Jugun ianfu* yang tersisa kemudian dipulangkan ke rumah masing-masing, namun ada beberapa yang memilih tinggal karena malu kembali. Mereka khawatir ketika masa lalu mereka terbongkar sebagai *comfort women*, masyarakat akan memperlakukan mereka dengan tidak baik. Sehingga hal ini bukan hanya mengakibatkan luka fisik, tapi juga luka mental kepada korban yang mengharuskan mereka tetap diam menyimpan trauma yang di alami. Padahal, wanita-wanita mantan *comfort women* ini merupakan korban dari pelecehan seksual, namun mereka harus tetap diam agar tidak di *judge* oleh masyarakat.

Tahun 1990-an merupakan tahun di mana isu ini mulai diangkat dan diperhatikan secara serius, tepatnya tahun 1991 kemunculan dari salah satu mantan *Jugun Ianfu* di publik Korea Selatan (Yeong-ae, Nationalism and Gender in the Comfort Women Issue, 2009) sempat menggemparkan publik dan memecah keheningan korban selama ini. Kim Hak-Soon adalah *jugun ianfu* pertama yang menyuarakan isu perbudakan seksual yang dialaminya ketika masa penjajahan Jepang (Luck, 2018), di *press conference* tahun 1991,

Kim Hak-Soon bersaksi bahwa sekitar 300 tentara Jepang akan mengunjungi *comfort station* setiap 3 hari setelah bertugas, sehingga wanita-wanita yang ada di situ harus melayani setidaknya tiga sampai empat tentara setiap harinya. Pengakuan Kim Hak-Soon ini membuka mata banyak orang, korban-korban *jugun ianfu* mulai muncul setelah bungkam bertahun-tahun, masyarakat Korea Selatan juga mulai menyuarakan keadilan bagi para korban bersama lembaga non-Government yang bernama *Korean Council for The Women Drafted from Military Sexual Slavery* (Ariani, 2021) mereka melakukan demonstrasi menuntut tanggung jawab dari pemerintah Jepang atas pelanggaran Hak Asasi Manusia para korban. Vokalnya suara masyarakat, lembaga organisasi dan para korban yang menuntut pertanggung jawaban, pemerintah Korea Selatan juga akhirnya mulai mengupayakan penyelesaian isu ini.

Atas pelanggaran hak asasi para korban, mereka meminta permintaan maaf secara formal kepada pemerintah Jepang beserta kompensasi kepada para korban, namun pemerintah Jepang malah gagal dalam menanggapi permasalahan ini, adanya penolakan permintaan maaf dan pemberian kompensasi merupakan tanggapan kecil yang diberikan oleh pemerintah Jepang, mereka juga bersikeras bahwa permasalahan ini sudah selesai melalui *1951 San Fransisco Peace Treaty* dan *1965 Treaty of Basic Relations* Korea dan Jepang, padahal kedua perjanjian ini tidak menyinggung isu *comfort women* secara spesifik.

Adanya perbedaan pandangan dari Jepang dan Korea Selatan ini menjadikan isu *jugun ianfu* atau *comfort women* ini sebagai kekerasan selama peperangan dan kejahatan kemanusiaan yang dialami wanita diakibatkan oleh perang dunia, sehingga isu ini banyak menarik perhatian komunitas internasional seperti aktifis, organisasi-oranisasi maupun negara. Salah satu contoh dari perhatian yang diberikan dunia pada korban *comfort women* yaitu pada 13 Desember 2007, parlemen Eropa mengusulkan dan mengeluarkan

resolusi keadilan untuk *comfort women* dan memanggil pemerintah Jepang untuk secara resmi mengakui, meminta maaf dan bertanggung jawab secara tegas atas perbudakan seksual yang dilakukan oleh militer Jepang terhadap para *comfort women* (Strasbourg, 2008). Karena banyaknya perhatian dari beberapa pihak ini Jepang merasa tersudutkan karena isu ini menggambarkan kekejaman Jepang termasuk dalam isu kemanusiaan juga pada masa Perang Dunia II, walaupun demikian Jepang tidak pernah mengaku secara resmi atas kejahatan yang telah ditimbulkan.

Pasca perjanjian damai Korea Selatan dan Jepang tahun 1965 banyak pejabat-pejabat Jepang yang meminta maaf dan menyatakan penyesalan terhadap penjajahan di Semenanjung Korea, hal ini berlangsung dari 1990 sampai 1999 yang ditujukan untuk mempererat hubungan diplomatik Jepang dengan Korea Selatan namun disetiap permintaan maaf tersebut tidak pernah disebutkan secara spesifik mengenai isu *comfort women* (Setiarini, 2017).

Pada tahun 1993 secara resmi pemerintah Jepang mengakui tentang keberadaan *comfort women* dan ketika itu Kepala Sekretaris Yohei Kono sebagai juru bicara pemerintah Jepang dan Perdana Menteri Tomichi Murayama menyampaikan permintaan maaf dan mengakui peran Jepang terhadap para korban *comfort women*, dengan turut berperan dalam pendirian serta administrasi sistem *jugun ianfu* yang menyebabkan penderitaan secara fisik dan mental kepada *comfort women*, pada saat itu, pernyataan ini disebut sebagai *Kono Statement* dan *Murayama Statement*. Namun, pada tahun 2007 Shinzo Abe mengatakan bahwa tidak ada bukti kuat terhadap paksaan yang dilakukan oleh tentara Jepang kepada *comfort women* (Noor, 2015). Penyangkalan oleh Abe ini bertentangan dengan pengakuan Kono tahun 1993, sehingga hal ini menimbulkan kontroversi yang mana memperlihatkan bahwa isu *comfort women* belumlah selesai.

Karena banyaknya desakan dari Korea Selatan baik itu warganya maupun pemerintahnya akhirnya pada 28 Desember 2015 Jepang dan Korea Selatan mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sejarah gelap kedua negara ini yang juga termasuk dengan isu *comfort women*, Menteri Luar Negeri Jepang yaitu Fumio Kishida mengatakan bahwa pemerintahannya akan memberikan dana sebesar 1 miliar yen untuk membantu para korban yang selama ini sudah menderita, Perdana Menteri Shinzo Abe juga menyampaikan permintaan maaf yang paling tulus kepada semua korban *comfort women* (Yan, Kwon, Ogura, & Ap, 2015). Namun isu ini masih sangat membekas di ingatan dan hati para *comfort women* dan meninggalkan luka trauma yang mendalam bagi mereka, mengingat Jepang sempat *denial* terhadap isu ini menimbulkan pertanyaan bagi peneliti.

Selama ini isu *jugun ianfu* atau *comfort women* ini merupakan salah satu tembok tinggi yang menghalangi kedua negara ini untuk berhubungan secara damai, lika-liku hubungan kedua negara ini bisa dilihat dari bagaimana kedua negara ini berupaya berhubungan menyelesaikan isu ini. Namun untuk menyelesaikan isu ini bukanlah perkara mudah yang bisa selesai dengan permintaan maaf secara moral, trauma yang mendalam dan luka yang ditinggalkan kepada para korban mantan *comfort women* ini bukanlah hal sepele, permintaan maaf secara resmi dan kompensasi untuk tanggung jawab secara hukum merupakan hal yang diinginkan oleh para korban, namun untuk mencapai hal itu sepertinya harus melalui jalanan berbatu dalam dinamika hubungan Korea Selatan dengan Jepang. Walaupun begitu, Korea Selatan tetap mengupayakan agar isu ini segera selesai, sehingga kesepakatan yang ada merupakan awal dari pemulihan hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan Jepang.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan topik yang akan dibahas oleh penulis, maka dirumuskanlah pertanyaan oleh penulis yaitu “**Bagaimana Korea Selatan dapat mencapai *Agreement on Comfort Women* pada tahun 2015 bersama Jepang?**”

## **C. Kerangka Teori**

Untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang mendorong tercapainya *Agreement on Comfort Women* tahun 2015, diperlukan teori untuk membantu penulis dalam memudahkan proses analisa. Oleh karena itu dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teori ***Foreign Policy Decision Making*** atau **teori Pengambilan Keputusan Luar Negeri**.

Penulis akan menggunakan **teori *Foreign Policy decision making*** atau teori pengambilan keputusan Luar Negeri. Menurut William D. Coplin, teori *Foreign Policy decision making* merupakan salah satu cara untuk lebih memahami perilaku sebuah negara dalam hubungan internasional. Coplin menjelaskan bahwa dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri suatu negara biasanya berupa tindakan atau sebuah strategi untuk mencapai kepentingan nasionalnya, dalam pengambilan keputusan luar negeri ada beberapa faktor yang mempengaruhi, selaras dengan Coplin, Snyder juga menjelaskan bahwa dalam model *foreign policy decision making* terdapat faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi proses pembuatan keputusan politik luar negeri oleh negara (Snyder, 1962), faktor internal merupakan faktor yang lebih ditekankan pada hubungan masyarakat dan negara, sedangkan faktor eksternal sendiri ditekankan kepada situasi internasional yaitu hubungan suatu negara dengan negara lainnya.

Menurut William D. Coplin sebuah negara yang bersikap atau mencapai sebuah kebijakan luar negeri dibelakangnya pasti memiliki para pemimpin negara yang mempertimbangkan banyak hal, pada akhirnya tindakan yang diambil merupakan kumpulan dari pertimbangan

yang mempengaruhi para pembuat kebijakan (Coplin & Marbun, 2003). Terdapat tiga kategori pertimbangan yang diyakini Coplin mempengaruhi pengambilan keputusan luar negeri, yaitu politik domestik, kemampuan atau situasi ekonomi dan militer negara, serta konteks internasional.

1. Politik domestik atau kondisi politik dalam negeri dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi para pembuat kebijakan karena memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perumusan politik luar negeri suatu negara, selain itu struktur masyarakat seperti sisi kebudayaan yang dianut oleh masyarakat luas bisa mempengaruhi kebijakan luar negeri (Coplin & Marbun, 2003).
2. Situasi ekonomi dan militer juga merupakan salah satu faktor yang di pertimbangkan dalam merumuskan tindakan pengambilan keputusan luar negeri, negara dapat atau bersedia untuk menciptakan kondisi yang aman atau kondusif dalam menopang politik luar negerinya baik dari situasi ekonomi maupun militernya (Coplin & Marbun, 2003).
3. Konteks internasional sendiri merupakan kondisi politik atau lainnya diluar negara tersebut, dukungan maupun pengaruh-pengaruh dari negara lain dalam mendorong pengambilan sikap atau keputusan luar negeri menjadi salah satu pertimbangan oleh negara (Coplin & Marbun, 2003).

Untuk memahami tiga kategori pertimbangan ini, William D. Coplin memaparkan pemikirannya tentang gambaran perjalanan pengambilan kebijakan luar negeri melalui sebuah skema teori, melalui skema inilah Coplin berharap bisa menyampaikan dan menjelaskan tiga pertimbangan oleh negara dalam diambilnya kebijakan luar negeri.



Skema Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin



Gambar 1 Skema Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri William D. Coplin

Sumber: (Coplin & Marbun, 2003)

Dapat dilihat dari skema teori yang sudah dipaparkan diatas, bahwa untuk mencapai sebuah kebijakan atau keputusan luar negeri terdapat beberapa proses serta pertimbangan yang akan dianalisis oleh para pembuat kebijakan. Adanya dorongan dan tuntutan oleh kondisi politik dalam negeri atau politik domestik sebuah negara merupakan konsiderasi bagi pengambilan kebijakan luar negeri, selain itu situasi ekonomi dan militer sebuah negara juga merupakan pertimbangan bagi negara dalam proses pengambilan keputusan oleh para pembuat kebijakan. bukan hanya politik domestic dan situasi ekonomi dan militer saja yang di konsiderasikan oleh para pembuat kebijakan luar negeri, namun konteks internasional juga turut memberikan tuntutan atau dorongan yang cukup berpengaruh kepada para pengambil keputusan atau kebijakan luar negeri. Ketika sebuah negara sudah memiliki pertimbangan dan konsideran, maka dalam prosesnya para pengambil keputusan kemudian menganalisis dan memproses pertimbangan tersebut untuk menghasilkan sebuah kebijakan luar negeri.

Untuk menjawab rumusan masalah yang sudah penulis paparkan sebelumnya, penulis akan menggunakan kerangka berpikir teoritik menggunakan teori *foreign policy decision making* yang dijelaskan oleh William D. Coplin, teori ini akan dijelaskan dan diaplikasikan secara sederhana oleh penulis untuk menggambarkan bahwa dalam pengambilan keputusan

atau kebijakan suatu negara tak luput dari tiga faktor determinan yang sudah dijelaskan sebelumnya.

### **Kondisi Politik Domestik**

Politik domestik sebuah negara merupakan salah satu faktor determinan dalam pengambilan keputusan luar negeri, menurut William D. Coplin kondisi politik dalam negeri adalah hubungan antara para pembuat kebijakan luar negeri bersama dengan aktor-aktor dalam negeri maupun masyarakat (Coplin & Marbun, 2003) kondisi politik domestik juga berkaitan erat dengan faktor budaya serta struktur masyarakat dalam negeri. Tuntutan masyarakat maupun aspirasi dari masyarakat juga merupakan salah satu faktor dalam negeri yang menjadi pertimbangan untuk dikeluarkannya suatu kebijakan. Dalam kasus isu *comfort women*, adanya sejarah kelam yang di alami oleh masyarakat Korea Selatan yang di akibatkan oleh Jepang pada masa PD II sangat membekas di ingatan, Jepang yang tak kunjung bertanggung jawab dan meminta maaf kepada para korban mebuat perspektif masyarakat terhadap Jepang semakin memburuk, adanya tuntutan dari masyarakat Korea Selatan serta para aktivis massif menyuarakan agar pemerintah segera menangani masalah ini dengan serius, selain itu masyarakat dan para aktivis gencar menuntut Jepang untuk segera bertanggung jawab kepada para korban guna menyelesaikan isu ini. Tuntutan publik Korea Selatan ini kemudian mempengaruhi langkah pemerintah Korea Selatan dalam melakukan kerjasama bilateral bersama dengan Jepang.

Tuntutan publik bisa mempengaruhi kebijakan suatu negara dengan melakukan pemberitaan lewat tulisan-tulisan di media yang membuat para pembaca berita tersebut setuju dengan perspektif penulis (Widia, 2018) dan akhirnya tulisan-tulisan inilah yang akan menjadi pro dan kontra dalam masyarakat sehingga pembuat keputusan haruslah mempertimbangkan kembali keputusannya. Opini publik akan semakin berpengaruh

tergantung dari struktur domestik negara, apabila masyarakatnya homogen maka semakin mudah opini publik mempengaruhi kebijakan suatu negara (Kappen, 1991), Korea Selatan merupakan salah satu negara yang sangat homogen, baik dari ras ataupun linguistic. Adanya opini publik juga berkaitan erat dengan sikap publik, dengan adanya opini publik yang membentuk perspektif masyarakat bisa menimbulkan respon dari publik, hal inilah yang bisa merangsang kebijakan yang akan dibuat oleh pembuat keputusan (Widia, 2018) respon dari publik bisa berupa aksi protes demonstrasi, yang bertujuan untuk menekan pemerintah.

### **Situasi Militer**

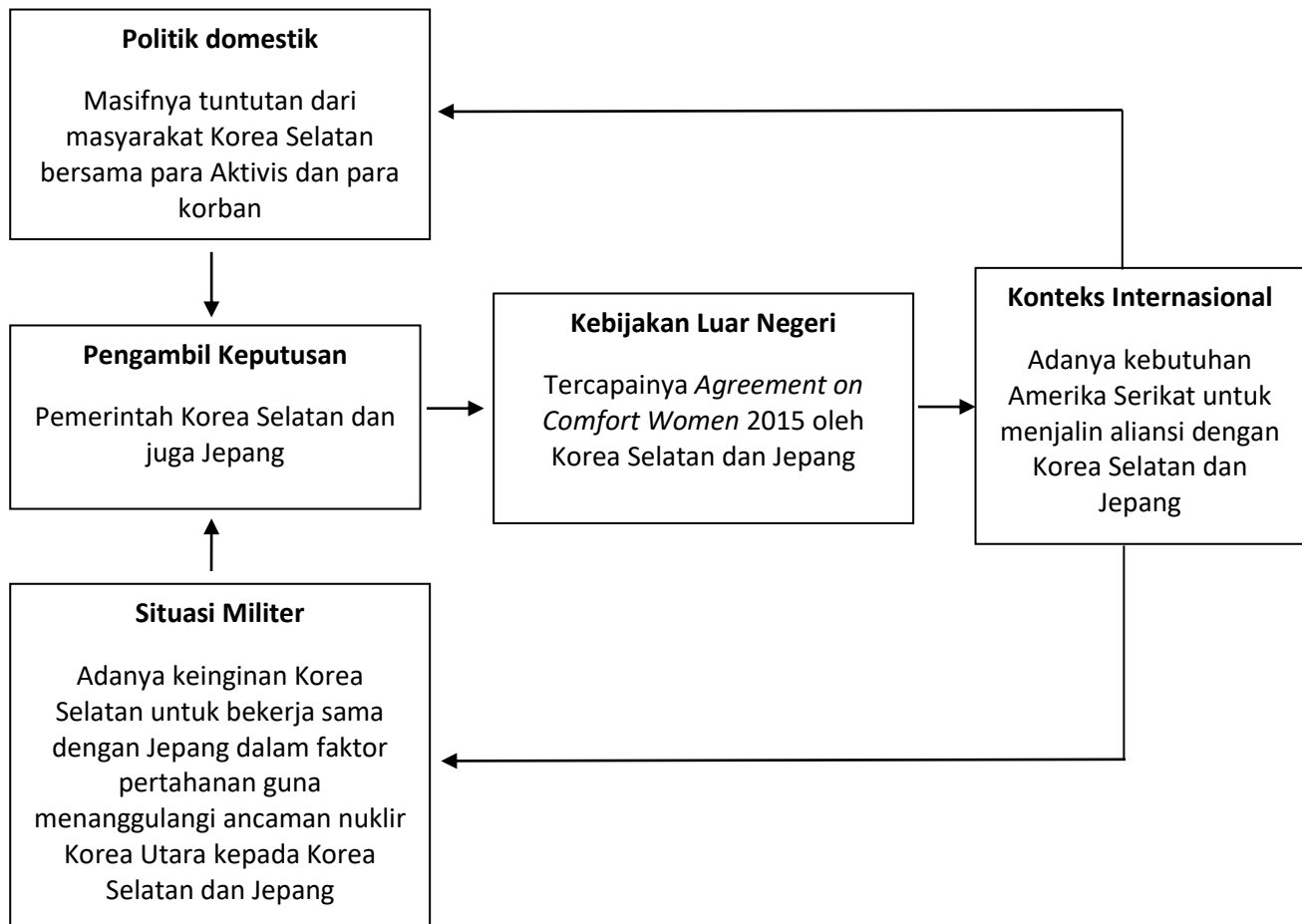
Menurut Coplin, suatu negara harus memiliki kemampuan serta kesediaan yang menopang politik luar negerinya, hal ini termasuk dengan pertimbangan pertahanan dan keamanan suatu negara. Situasi militer juga merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan oleh Korea Selatan dalam mencapai *Agreement on Comfort Women* bersama Jepang tahun 2015, Korea Selatan memiliki pertimbangan dalam situasi militer demi kestabilan pertahanan keadaan dalam negerinya, pertimbangan pertahanan dan keamanan ini didorong oleh adanya ancaman nuklir yang dilakukan oleh negara yang berbatasan dengannya yaitu Korea Utara. Adanya ancaman nuklir oleh Korea Utara ini cukup mengusik Korea Selatan dan Jepang, sehingga untuk menanggulangi kekhawatiran atas ancaman nuklir Korea Utara, Korea Selatan harus bekerja sama dengan Jepang dalam menangani pergerakan dan ancaman yang berasal dari Korea Utara dengan cara pertukaran informasi intelijen. Namun, hubungan kerjasama ini masih terhalang oleh isu historikal *comfort women*, sehingga situasi keamanan militer inilah yang menjadi pertimbangan bagi Korea Selatan dan Jepang untuk mencapai *Agreement on Comfort Women* tahun 2015.

### **Konteks Internasional**

Konteks internasional merupakan suatu hal yang terjadi di luar negara, menurut William D. Coplin dalam pengambilan keputusan luar negeri konteks internasional harus melihat beberapa faktor, salah satunya yaitu hubungan dengan negara lain yang harus menjadi pertimbangan dalam mencapai keputusan luar negeri, dalam faktor politik negara harus mempertimbangkan hubungan politik dengan negara lain karena semua berkaitan dengan kepentingan nasional masing-masing negara (Widia, 2018). Dalam tercapainya *Agreement on Comfort Women* 2015 tak luput dari konsiderasi konteks internasional, dimana adanya dukungan serta dorongan dari Amerika Serikat yang merupakan aliansi bagi Korea Selatan dan Jepang. Sebagai negara yang ingin memperluas aliansinya di Kawasan Asia pasifik, Amerika Serikat kerap kali mendorong Korea Selatan dan Jepang untuk segera menyelesaikan isu ini agar kerjasama diantara ketiga negara ini tidak terganggu isu historikal. Oleh karena itu, demi mencapai kepentingan nasional masing-masing negara, hal ini menjadi pertimbangan bagi Korea Selatan dan Jepang untuk mencapai *Agreement on Comfort Women* tahun 2015.

Oleh karena itu, penulis ingin menjelaskan bagaimana para pembuat keputusan membuat keputusan dengan di hadapkan pada faktor-faktor tersebut sehingga Korea Selatan mencapai *Agreement on Comfort Women* tahun 2015 bersama dengan Jepang. Tercapainya *Agreement on Comfort Women* tahun 2015 oleh Korea Selatan dan Jepang dapat dijelaskan melalui skema berikut:

Bagan 1 : Aplikasi teori pengambilan kebijakan luar negeri oleh William D. Coplin dalam tercapainya *Agreement on Comfort Women* tahun 2015.



Bagan 1 Aplikasi Teori Pengambilan Kebijakan Luar Negeri oleh William D. Coplin dalam tercapainya *Agreement on Comfort Women* tahun 2015

Berdasarkan dari deskripsi dan penjelasan teori pembuatan keputusan luar negeri, penulis percaya bahwa teori ini bisa diterapkan dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi Korea Selatan dan Jepang mencapai *Agreement on Comfort Women* tahun 2015. Oleh karena penjelasan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis yakin bahwa teori pengambilan keputusan luar negeri dapat membantu memudahkan penulis dalam menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi Korea Selatan untuk mencapai *Agreement on Comfort Women* 2015 bersama Jepang.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu menggunakan metode kualitatif, dimana data penelitian diperoleh melalui data studi pustaka. Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara memanfaatkan sumber informasi yang relevan seperti buku, jurnal, media elektronik, dan website yang isi datanya mendukung serta berkaitan dengan isu yang dibahas. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber ini kemudian dianalisis serta diamati agar sesuai dengan penelitian yang dibahas.

#### **E. Hipotesa / Argumen**

Berdasarkan latar belakang masalah dan teori yang mendasari kerangka teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis dapat menarik hipotesa bahwa faktor-faktor tercapainya *Agreement on Comfort Woman* tahun 2015 antara Korea Selatan dengan Jepang, yaitu:

Adanya faktor internal dan eksternal yaitu:

1. Kondisi politik domestik Korea Selatan yang masyarakatnya menuntut penyelesaian isu comfort women melalui *Wednesday demonstration*.
2. Situasi pertahanan yang di konsiderasikan oleh Korea Selatan dan Jepang atas adanya ancaman nuklir Korea Utara.
3. Konteks internasional yang dipertimbangkan oleh Korea Selatan dan Jepang yaitu dorongan dari Amerika Serikat sebagai ailansi dan negara super power.

#### **F. Jangkauan Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan jangkauan penelitian dengan batasan waktu agar kajian ini akan lebih terfokus kepada topik yang relevan. Atas alasan ini, penulis kemudian menetapkan tahun 2015 sebagai batasan waktu dari berbagai faktor yang mempengaruhi Jepang oleh Korea Selatan dalam mencapai *Agreement on Comfort Women*

2015, batasan ini di pilih oleh penulis dengan alasan pada tahun 2015 ini lah *Agreement on Comfort Women* disepakati oleh Korea Selatan dan Jepang. Secara garis besar, penelitian ini membahas dari awal mula munculnya isu *jugun ianfu* yaitu pada tahun 1991, hingga selesainya isu ini pada tahun 2015.

## **G. Sistematika Penulisan**

**BAB I** Bab ini berisi mengenai Pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Konseptual, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II FAKTOR INTERNAL**

2.1 Tercapainya *Agreement on Comfort Women* 2015

2.2 Faktor Internal yang menjadi konsiderasi tercapainya *Agreement on Comfort Women* 2015

2.2.1 Tuntutan dari masyarakat Korea Selatan

### **BAB III FAKTOR EKSTERNAL**

3.1 Konsiderasi Situasi Militer

3.2 Dorongan Amerika Serikat kepada Korea Selatan dan Jepang

**PENUTUP** Pada pembahasan ini penulis akan merangkum penelitian yang telah disebutkan dan dijelaskan oleh penulis di bab-bab sebelumnya.